



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 SUMBAWA
BESAR

Jl. Garuda Nomor 107, Sumbawa Besar 84351; TELEPON (0371) 21224; FAKSIMILE (0371) 21720; SUREL
kppn999146@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sumbawabesar

Nomor : S-365/KPN.2304/2023 28 Juli 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Mekanisme Pencairan Dana atas Beban APBN pada Masa Transisi Piloting
Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Pencabutan Pandemi Covid-19

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Mitra KPPN Sumbawa Besar

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-199/PB/2023 tanggal 25 Juli 2023 hal tersebut diatas dan sehubungan dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Indonesia dan Piloting Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi pada SAKTI, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencairan dana atas beban APBN dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
2. Dalam hal Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi belum dapat dilakukan, penyampaian SPM secara sistem dilakukan mengacu pada mekanisme pengiriman dokumen secara elektronik menggunakan SAKTI dengan disertai kewajiban penyampaian hardcopy SPM dan dokumen pendukung paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (detail mekanisme terlampir).
3. Pada saat Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 mulai berlaku, ketentuan mengenai mekanisme penyampaian hardcopy SPM/SP3BBLU/MPHL-BJS atau SP2HL/SP4HL atau APDPL/SKP-L/C (bertandatangan) beserta dokumen pendukung sebagaimana diatur pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-94/PB/2020 tentang Mekanisme Penyampaian Hardcopy SPM/SP3BBLU/MPHL-BJS atau SP2HL/SP4HL atau APDPL/SKP-L/C (BertandaTangan) pada Masa Keadaan Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A2
Sumbawa Besar



Ditandatangani secara elektronik
Aziz Muthohar

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat

